

Akses Jalan di JIS Dikritik, Dishub DKI Sebut Karena Pembangunan Jalan Tol

JAKARTA (IM) - Dinas Perhubungan DKI Jakarta menjelaskan penyebab minimnya akses jalan di sekitar Stadion Jakarta Internasional Stadium (JIS) saat konser Dewa 19 berlangsung pada Sabtu (4/2) lalu. Hal itu menyebabkan ruwetnya arus kepulangan 65 ribu penonton konser hingga menuai kritik di jagat media sosial.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, pengurangan lajur di Jalan RE Martadinata dari empat menjadi dua lajur adalah salah satu faktor penyebab sempitnya akses jalan di JIS dan menyebabkan kemacetan saat penonton konser Dewa 19 bubar.

"Karena saat ini di Jalan RE Martadinata sedang ada pembangunan tol Harbour II. Itu yang di sisi utaranya," tutur Syafrin di Balai Kota, Kamis (9/2).

Penyebab lainnya adalah adanya perbaikan jalan di Ja-

lan Danau Sunter Barat dan Jalan Sunter Permai Raya.

"Sehingga lajur ideal di sana empat lajur itu tidak optimal kemarin. Kami sudah kerahkan petugas kemarin, tapi karena kondisinya jalannya seperti itu maka ini belum bisa kita paksakan terjadi kelancaran," jelas Syafrin.

Pihaknya telah berupaya melalui berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga serta kontraktor pembangunan jalan tol agar melakukan akselerasi pengerjaan proyek. Syafrin juga menambahkan, Dishub DKI sudah melakukan rekayasa lalu lintas dan melakukan sosialisasi secara masif kepada masraka terkait konser Dewa 19 di JIS.

"Rekayasa ada contohnya untuk lokasi parkir itu kami arahkan sebagian di sisi utara itu ke parkir Formula E. Yang selebihnya di sisi baratnya parkir di kawasan Kemayoran. Demikian pulanya pemanfaatan gedung-gedung parkir di kawasan sekitar," tandasnya. ● yan

Komunitas Ojol Desak Gubernur DKI Copot Kadishub, Syafrin: Terserah Pimpinan

JAKARTA (IM) - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo angkat bicara usai komunitas pengemudi ojek online (ojol) Predator melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (8/2) kemarin. Salah satu tuntutan mereka ialah pencopotan Syafrin Liputo dari jabatan Kadishub DKI karena program jalan bayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP).

Syafrin menegaskan keputusan untuk mempromosikan maupun mendemosi dirinya dari jabatan adalah wewenang gubernur.

"Ya, tentu kita serahkan kepada pimpinan. Apapun itu tentu kita melakukan yang terbaik," kata Syafrin di Balai Kota, Kamis (9/2). Tuntutan itu ditengarai karena komunitas ojol tersinggung dengan pemberitaan salah satu media *online* yang menulis pernyataan Syafrin kalau demonstrasi ojol tak berpengaruh terhadap kebijakan ERP.

"Sekali lagi bahwa kalimat itu tidak keluar dari saya, mungkin bisa dibaca secara terang benderang berkaitan dengan bagaimana pembahasan regulasi di depan. Jadi tidak ada kalimat dari saya menyatakan bahwa demo apa namanya tadi? Demo Ojol tidak berpengaruh. Itu satu hal yang tentu

kontraproduktif dengan apa yang selama ini saya sampaikan," tuturnya.

Hingga saat ini, pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) ERP masih terus berjalan. Syafrin menambahkan, baik eksekutif maupun legislatif akan tetap objektif serta komprehensif dalam membahas regulasi.

"Belum, karena di depan masih di tahap semacam rapat dengar pendapat dan tentu dari depan pun akan sangat objektif menerima masukan-masukan dari masyarakat, dari sisi kesewenangan mereka selaku pembuat kebijakan," tukasnya.

Sebelumnya, komunitas mitra ojol Predator melakukan aksi demonstrasi kedua kalinya. Kemarin, aksi demo dilakukan di depan Balai Kota DKI setelah sebelumnya pada 25 Januari aksi demo dilakukan di depan Gedung DPRD DKI.

Aksi itu dilakukan sebagai bentuk menentang atas kebijakan ERP. Diketahui dalam draf regulasi ERP, kendaraan roda dua turut terkena kebijakan pengendalian lalu lintas tersebut. Namun, Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan ojol tidak termasuk kendaraan roda dua yang terkena ERP karena masuk kategori angkutan umum daring. ● yan

Kurangi Penyebab Kemacetan, Dishub DKI Tutup 4 Putaran Balik

JAKARTA (IM) - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan menutup empat titik putaran balik (*u-turn*) di wilayah Jakarta Pusat tahun ini. Penutupan *u-turn* dilakukan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas kendaraan yang kerap terjadi di kawasan sekitar.

Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebutkan, empat titik *u-turn* yang akan ditutup di wilayah Jakarta Pusat tersebar di Jalan Garuda (titik Wuling Motors), Jalan Palmerah Utara (titik Apotek Bundaran Slipi), Jalan Sukarjo Wiryopranoto (titik BNI Sawah Besar), dan Jalan Pejomangan (titik Menara BNI).

Penutupan empat titik *u-turn* diputuskan berdasarkan hasil kajian serta evaluasi bersama dengan Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Pusat. "Empat titik *u-turn* ini kerap menimbulkan kemacetan karena

adanya juru parkir liar. Sehingga perlu ditutup untuk memperlancar sirkulasi lalu lintas di sekitar," katanya, Kamis (9/2).

Syafrin menuturkan, saat ini Sudinhub Jakarta Pusat tengah membuat rencana triwulan yang salah satunya membahas penutupan empat titik *u-turn*. "Penutupan *u-turn* sementara waktu akan menggunakan *water barrier* atau *traffic cone*. Rencananya dimulai semester I tahun ini," jelasnya.

Menurut Syafrin, setelah dilakukan penutupan, pihaknya bersama Sudinhub Jakarta Pusat akan mengevaluasi kondisi lalu lintas di tiap titik.

Dari evaluasi tersebut bakal ditentukan apakah perlu dilakukan penutupan permanen atau sebaliknya.

"Kalau dari hasil evaluasi setelah tiga bulan harus ditutup permanen, maka akan kita tutup," tandasnya. ● yan

4 | Metropolis

FOTO/ANT



VARREL BRAMASTA RESMI GABUNG PAN

Aktor yang juga kader PAN Varrel Bramasta (kiri) bersama Ketua DPW PAN Eko Hendro Purnomo (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan pada acara perkenalan kader baru PAN di kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (9/2). Varrel Bramasta resmi menjadi kader PAN dan akan maju sebagai calon legislatif pada Pemilu 2024.

Tol Becakayu Bakal Dibuka Full, Bekasi-Jakarta Hemat 30 Menit

Waktu perjalanan dari Jakarta Timur menuju Bekasi dan sebaliknya yang sebelumnya bisa satu jam bahkan lebih, sekarang dapat ditempuh dalam 20-30 menit saja, sehingga hemat waktu hingga 30 menit. Ini dampak positifnya besar sekali untuk masyarakat, terutama bagi masyarakat yang melakukan commuter dari Bekasi.

JAKARTA (IM) - Tol Bekasi-Cawang-Kampung ke Marga Jaya. Kementerian PUPR sudah memberikan

izin untuk operasi tol seksi 2A dan 2A Ujung yang menghubungkan Jakasampurna ke Marga Jaya.

Direktur Utama KKDM, Aris Mujiono menyampaikan waktu tempuh perjalanan masyarakat akan makin singkat dengan jalan tol ini. Setidaknya dari Jakarta Timur ke Bekasi cuma butuh waktu 30 menit saja.

"Waktu perjalanan dari Jakarta Timur menuju Bekasi dan sebaliknya yang sebelumnya bisa satu jam bahkan lebih, sekarang dapat

ditempuh dalam 20-30 menit saja, sehingga hemat waktu hingga 30 menit. Ini dampak positifnya besar sekali untuk masyarakat, terutama bagi masyarakat yang melakukan commuter dari Bekasi," ujar Aris dalam keterangannya, Kamis (9/2).

Selain itu dengan adanya koneksi jalan tol Becakayu dengan jalan tol Wiyoto-Wiyono, diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas dari arah Tanjung Priok menuju Bekasi dan sebaliknya.

Dengan beroperasinya dua seksi tadi, Jalan Tol Becakayu akan resmi menyambungkan wilayah Bekasi hingga Kampung Melayu sepanjang 16,78 km.

Guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan, KKDM telah melaksanakan sejumlah kegiatan perbaikan dan pemeliharaan sebagai bagian dari persiapan pengoperasian.

"Kegiatan yang dilakukan antara lain perbaikan marka jalan, perbaikan dan pembersihan *concrete barrier* serta melakukan upaya penghijauan di sekitaran Jalan Tol Becakayu," papar Aris.

Sebelumnya, Ruas Jakasampurna - Marga Jaya sempat dioperasikan secara fungsional sebagai uji coba pada periode Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 yang berlangsung sejak 23 Desember 2022 - 3 Januari 2023. ● yan

DPRD DKI Belum Terima Keputusan Resmi Raperda ERP Dicabut

JAKARTA (IM) - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE) soal electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bisa saja dicabut.

Namun, pihaknya belum menerima usulan pencabutan raperda secara dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. "Bisa nanti dicabut ada aturan secara resmi. Bisa dicabut tapi nanti lewat paripurna karena penyerahannya kan di paripurna maka diakhiri dengan

paripurna," kata Pantas kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/2).

Politikus PDIP itu menyatakan, hingga kini belum ada pernyataan resmi mengenai pencabutan Raperda ERP tersebut. Informasi adanya pencabutan beleid itu baru didengarnya lewat media.

Pantas menegaskan, jika memang ada langkah pencabutan raperda, Bapemperda DPRD DKI menunggu pernyataan resmi dari Penjabat (Pj) Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, baru kemudian ditindaklanjuti. Setelah itu, pihaknya melakukan peninjauan ulang atau evaluasi kembali terkait pembahasan raperda itu.

"Ditunggu saja prosesnya nanti akan ada surat resmi dari (Pj) Gubernur untuk menarik Raperda tersebut. Yang menyampikan Gubernur, makanya yang mencabut juga Gubernur," tutur Pantas.

Pemprov DKI akhirnya memilih meninjau ulang pembahasan Raperda ERP, usai mendapat penolakan. Salah satunya dari kalangan pengemudi ojek daring yang menggelar demonstrasi di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (8/2).

"Kami akan koordinasikan dengan DPRD DKI untuk Raperdanya dikembalikan ke Pemprov," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo. ● yan

BANDING VIANI LIMARDI ATAS PEMECATANNYA DITOLAK PSI Minta DPRD DKI Segera Proses PAW

JAKARTA (IM) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta permohonan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD DKI Jakarta, Viani Limardi segera dilakukan. Permohonan ini dilayangkan ke pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Permintaan ini menyusul penolakan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta atas banding yang diajukan Viani terkait pemecatan dirinya sebagai anggota PSI.

Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka meminta permohonan itu segera dilakukan karena sudah ada dua putusan hukum yang menguatkan soal pemecatan Viani. "Sudah ada dua putusan pengadilan yang menguatkan, Pengadilan Negeri (Jakarta Pusat) dan Pengadilan Tinggi (DKI Jakarta). Karena itu, kami meminta permohonan PAW untuk Sis Viani segera dilaksanakan," tutur Isyana dalam keterangannya, Kamis (9/2).

Ia menegaskan, pemberhentian itu dilakukan karena langkah Viani dianggap tidak sejalan dengan visi dan misi PSI. Viani juga dianggap melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) PSI. "Maka, secara otomatis, dia (Viani) juga tak berhak menjadi anggota DPRD DKI Jakarta mewakili PSI," ucap Isyana.

Untuk diketahui, PT DKI Jakarta menolak banding yang diajukan Viani terkait pemecatan dirinya sebagai anggota PSI. Dalam putusan pada 31

Januari 2023, majelis hakim PT DKI Jakarta memutuskan untuk menguatkan putusan PN Jakarta Pusat.

Putusan PN Jakarta menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan nomor 637/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst yang diajukan Viani. "Menguatkan putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 637/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 4 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut," demikian putusan majelis hakim PT DKI Jakarta, dikutip dari laman SIPP PN Jakarta Pusat, Kamis.

Majelis hakim PT DKI Jakarta juga menghukum Viani membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000. Adapun putusan banding ini diputuskan oleh majelis hakim yang diketuai Tony Pribadi serta hakim anggota Yahya Syam dan Sugeng Infanto.

Sebagai informasi, Viani dipecat dari keanggotaan PSI setelah disebut menggelungkan dana dalam laporan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk kegiatan reses. Selain itu, Viani disebut melanggar aturan perilaku anggota legislatif PSI karena tidak mematuhi instruksi DPP PSI pascapengalangan peraturan sistem ganjil genap yang dia lakukan pada 12 Agustus 2021.

Viani juga disebut tidak mengindahkan perintah dari DPP PSI yang meminta pemotongan gaji untuk bantuan penanganan Covid-19 yang dimulai 3 April 2020. Konsekuensi dari pemecatan itu, posisi Viani sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI harus digantikan kader lain melalui mekanisme PAW. ● yan



FOTO: ANT

EVAKUASI MONYET EKOR PANJANG

Petugas Jakarta Konservasi Animal Rescue mengevakuasi monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) di kawasan Rawa Badak, Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (9/2). Evakuasi itu dilakukan karena para warga khawatir monyet tersebut dapat menularkan sejumlah penyakit seperti TBC.

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SURYA DHARMAGATI ("Perseroan")	
Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada :	
Hari/Tanggal : Senin / 06 Maret 2023	
Jam : 10.00 WIB	
Tempat : Jalan Pantai Indah Selatan, Komplek Sentra Industri Terpadu I & II Pantan Indah Kapuk Blok C No. 01 s/d 09, Penjaringan Kamal Muara, Jakarta Utara	
Acara Rapat :	
I. Mengubah isi Pasal 11 tentang DIREKSI dalam anggaran dasar Perseroan.	
II. Penggantian kedudukan pemegang saham dalam Perseroan.	
III. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjamin sebagian besar harta kekayaan Perseroan kepada Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank.	
IV. Memutuskan hal-hal lain yang perlu.	
Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut tersedia di kantor Perseroan, sejak tanggal dilakukan panggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS dilaksanakan.	
Panggilan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	
Jakarta, 10 Februari 2023	
Direktur Utama PT SURYA DHARMAGATI WIRYANTO, KHONG	

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MITRA ABADI JAYA BERSAMA ("Perseroan")	
Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada :	
Hari/Tanggal : Senin / 06 Maret 2023	
Jam : 13.20 WIB	
Tempat : Jalan Pantai Indah Selatan, Komplek Sentra Industri Terpadu I & II Pantan Indah Kapuk Blok C No. 01 s/d 09, Penjaringan Kamal Muara, Jakarta Utara	
Acara Rapat :	
I. Penggantian kedudukan pemegang saham dalam Perseroan.	
II. Mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta mengangkat susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru.	
III. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjamin sebagian besar harta kekayaan Perseroan kepada Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank.	
IV. Memutuskan hal-hal lain yang perlu.	
Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut tersedia di kantor Perseroan, sejak tanggal dilakukan panggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS dilaksanakan.	
Panggilan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	
Jakarta, 10 Februari 2023	
Direktur PT MITRA ABADI JAYA BERSAMA WIRYANTO, KHONG	

TELAH HILANG
Sertifikat Hak Milik (SHM) Bumi dan Bangunan, NOP.32.18.081.006.009-0128.0 Atas Nama Parsaulian LT. 48m2, LB: 42m2 Terletak di Kp. Bulu Tengah RT.006 RW.23 Setia Mekar Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

PENGUMUMAN
PT KEPRI FUNTASY RESORT, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan diambilalih oleh pemegang saham saat ini di Perseroan, melalui pengambilan saham dari pemegang saham lain di Perseroan. Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 125 dan 127 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Tanggal 10 Februari 2023
Perseroan Direksi
Alamat Korespondensi: Jl. Pegangsaan Barat No.18, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia.

PENGUMUMAN
Sesuai UUPT, dgn ini diumumkan bhw PT API METRA BOGA di Jakarta Selatan akan mengalihkan sebagian besar sahamnya ke PT Pihak Ketiga. Kepada Pihak yg berkepentingan dapat menghubungi Direksi PT, paling lambat 14 hari sejak tgl. pengumuman ini, d/a Gedung Energy II 2, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Lot 11A SCBD, Senayan, Jakarta Selatan.